



This work is licensed under

[a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

DAMPAK PENJAJAHAN JEPANG DALAM BIDANG SOSIAL - BUDAYA DI INDONESIA 1942-1945

Tiara Titania¹, Yadri Irwansyah², Ratna Wulansari³

Universitas PGRI Silampari Lubuklinggau, Palembang, Indonesia^{1,2,3}

tiaratitania25@gmail.com¹, yadriirwansyah@gmail.com², ratnawulansari2015@gmail.com³

Keywords :

Romusha, Jugun Ianfu, Education, Seikeire, Keimin Bunka Shidoso, Indonesian Language, Japanese Language.

ABSTRACT

This research aims to describe the impact of Japanese colonization in the socio-cultural field in Indonesia 1942-1945. The method used in this research is historical research. The steps used include: Heuristics, source criticism, interpretation, and historiography. The results showed that in the social field, Japanese colonization had a profound impact. The practice of Romusha (forced labor) caused widespread physical and mental suffering among the Indonesian people, while the phenomenon of Jugun ianfu (forced comfort women) caused prolonged psychological and social trauma for its victims. In the education sector, although Japan introduced some new systems, the aim was more inclined towards indoctrination and mass mobilization to support their war interests, which in turn helped shape the character of the younger generation at that time. In the cultural sphere, the Japanese tried to erode local identity and instill Japanese values. And The practice of Seikeire (homage to the Japanese Emperor) was enforced as a form of loyalty. However, on the other hand, this period also indirectly triggered the development of Indonesian as a stronger unified language, while introducing a number of Japanese vocabulary and concepts that are still used today. The study concludes that despite its brevity, the Japanese occupation left a complex legacy that shaped the social and cultural dynamics of post-independence Indonesia..

PENDAHULUAN

Masa pendudukan Jepang di Indonesia 1942-1945 merupakan fase penting dalam sejarah bangsa Indonesia, meninggalkan jejak mendalam di berbagai aspek kehidupan, khususnya sosial budaya. Kedatangan Jepang tidak hanya menggantikan kekuasaan kolonial Belanda, tetapi juga membawa perubahan ekstrim yang digunakan untuk mengatur sumber daya di Indonesia demi kepentingan Perang Asia Timur Raya. Meski berlangsung singkat, dampak dari pendudukannya masih terasa hingga beberapa generasi kemudian. Menurut Melber dalam Kiswanto dkk, (2024:2) kebijakan pendudukan Jepang “Salah satu kebijakan paling mencolok adalah program *Romusha*, di mana ribuan rakyat Indonesia dipaksa bekerja dalam proyek-proyek *infrastruktur* untuk mendukung kepentingan perang Jepang”. “Program ini tidak hanya merenggut tenaga kerja produktif dari desa-desa, tetapi juga

menghancurkan stabilitas keluarga dan komunitas. Banyak keluarga yang bercerai-berai akibat kebijakan ini, yang mengakibatkan disintegrasi sosial.

Selain itu, Jepang memperkenalkan *reformasi* pendidikan dengan mengganti bahasa Belanda dengan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar. Meskipun kebijakan ini meningkatkan akses pendidikan bagi pribumi, tujuan utamanya adalah memperkuat kontrol Jepang. Kebijakan ini mendorong masyarakat untuk beradaptasi dengan sistem baru yang sering kali bertentangan dengan tradisi dan budaya lokal”. Namun, perubahan ini juga membawa dampak negatif. Kebijakan *romusha* yang diterapkan menyebabkan penderitaan yang luar biasa bagi rakyat Indonesia. Jutaan orang dipaksa bekerja dalam kondisi yang sangat buruk dan banyak yang meninggal karena kelaparan dan penyakit. Jepang juga melakukan *eksploitasi* sumber daya alam secara besar-besaran, yang menyebabkan kerusakan lingkungan dan kemiskinan. (Fadli & Kumalasari dalam Sinaga dkk, 2024:381) menyatakan “Pada masa pendudukan Jepang di Indonesia selama Perang Dunia II, kebijakan pemerintahan Jepang memiliki dua *prioritas* utama: menghapus pengaruh Barat dan memobilisasi rakyat Indonesia untuk mendukung kemenangan Jepang dalam perang. Sama seperti pemerintahan kolonial Belanda sebelumnya, Jepang juga berusaha menguasai Indonesia untuk kepentingan mereka sendiri. Namun, Jepang menghadapi tantangan yang serupa dengan yang dihadapi Belanda, dan menerapkan beberapa metode yang sama untuk mengatasi masalah tersebut. Dalam konteks perang yang memanfaatkan sumber daya secara maksimal, Jepang memfokuskan upayanya pada mobilisasi rakyat, terutama di Jawa dan Sumatera”.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara menyeluruh dampak pendudukan Jepang dalam bidang sosial budaya di Indonesia tahun 1942-1945. Penelitian ini akan menggunakan metode penelitian sejarah, dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber, seperti arsip, dokumen, dan buku. Data yang terkumpul akan dianalisis secara *kritis* untuk menghasilkan gambaran yang akurat tentang dampak pendudukan Jepang di Indonesia.

Dari latar belakang di atas peneliti ingin menunjukkan dampak-dampak positif maupun negatif dari kebijakan buatan Jepang yang ada di Indonesia. Tujuan peneliti ini adalah untuk menunjukkan masa pendudukan Jepang, tidak hanya menyisakan hal-hal yang berbau penderitaan saja, melainkan masih terdapat sedikit sisi atau dampak positif yang cukup berpengaruh bagi masa depan Indonesia. Serta menambah pemahaman tentang proses sejarah penjajahan Jepang dan dampaknya bagi masyarakat. Meskipun sejarah sering kali menyoroti penderitaan akibat Romusha dan eksploitasi, penelitian ini juga berupaya mengungkap "sisi lain" atau dampak positif tidak langsung, seperti penguatan Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Dengan menganalisis secara kritis kedua sisi ini —baik kebijakan represif maupun perubahan yang tak terduga —kita dapat memperoleh pemahaman yang lebih akurat tentang kompleksitas periode 1942-1945, yang akan memperkaya narasi sejarah nasional dan membantu kita menghargai ketahanan serta kemampuan adaptasi masyarakat Indonesia dalam menghadapi kondisi yang sangat sulit. Lebih dari sekadar kajian sejarah, penelitian ini memiliki relevansi kuat untuk memahami dinamika sosial dan budaya Indonesia pascakemerdekaan.

Kebijakan Jepang, seperti mobilisasi massa dan reformasi pendidikan, meninggalkan jejak mendalam yang membentuk struktur sosial dan karakter bangsa hingga hari ini. Dengan mengkaji akar-akar ini, kita bisa memahami mengapa masyarakat Indonesia berkembang seperti sekarang. Selain itu, dengan menyoroti penderitaan dan eksploitasi yang terjadi, penelitian ini menjadi pengingat penting tentang bahaya kekuasaan yang tidak terkontrol dan pentingnya menjaga kedaulatan bangsa serta hak asasi manusia, agar kesalahan sejarah tidak terulang.

METODE

A. Metode Penelitian

Penelitian ini memanfaatkan pendekatan sejarah (*History*) sebagai metodenya. Metode sejarah merujuk pada teknik atau cara untuk merekonstruksi peristiwa yang terjadi di masa lalu, dengan melibatkan empat tahap kerja esensial, yaitu heuristik (pengumpulan sumber), kritik sumber (penilaian sumber eksternal dan internal), interpretasi (penafsiran), dan historiografi (penulisan kisah sejarah)". Hamid & Madjid dalam Duma & Reka (2023:3). Karena berfokus pada Peristiwa Masa Lalu: Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan "Dampak Penjajahan Jepang dalam Bidang Sosial Budaya di Indonesia 1942-1945". Ini jelas merupakan penyelidikan terhadap peristiwa, fenomena, dan perubahan yang terjadi di masa lalu. Metode sejarah digunakan khusus untuk merekonstruksi dan memahami masa lampau secara sistematis.

B. Prosedur penelitian

Prosedur penelitian adalah langkah-langkah yang dipakai untuk mengumpulkan data guna menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan di dalam penelitian ini. Prosedur penelitian *Historis* dibagi menjadi empat tahapan yaitu sebagai berikut:

1. pemilihan topik

Dalam menulis sejarah, pemilihan topik menjadi pertimbangan utama yang disesuaikan dengan kemungkinan penyelesaian dalam waktu tertentu. Apalagi apabila topik yang dipilih belum pernah diteliti sebelumnya, tentu menjadi sebuah tantangan yang berat. Sehingga sangat disarankan untuk menulis penelitian yang dapat diselisaikan dalam waktu yang tersedia". Afidah (2021:23).

2. Heuristik (Pengumpulan Sumber)

Heuristik merupakan tahapan pertama dalam penelitian *Historis* setelah menentukan topik bahasan dengan mengumpulkan sumber. Dalam mengumpulkan sumber yang diperlukan dalam penulisan sejarah dikenal sebagai tahapan heuristik.

Menurut Ernest Berschen dalam Dewi, (2020:41) "*Heuristik* merupakan proses mencari dan menemukan atau mengumpulkan sumber-sumber sejarah". Sedangkan menurut G.J Renier dalam Abdurahman, (2011:101) "*heuristik* merupakan suatu teknik, suatu seni, dan bukan suatu ilmu".

3. Verifikasi (Kritik Sumber)

Tahapan berikutnya yaitu *verifikasi* atau kritik sumber adalah untuk menetapkan kebenaran fakta sejarah. Menurut Najwa & Bakri (2020:45) *verifikasi* adalah "menyelidiki apakah jejak-jejak sejarah itu asli atau palsu dan apakah dapat digunakan atau sesuai dengan tema penelitian. Proses ini dilakukan penulis dengan cara memilah-milah dan menyesuaikan data yang diperoleh dari *heuristik* dengan tema yang akan dikaji serta keaslian data sudah dapat diketahui.

4. Interpretasi (Penafsiran)

Menurut Kuntowijoyo dalam Abdurahman, (2011:111), "*Interpretasi* yang disebut juga dengan istilah *analisis* sejarah. *Analisis* berarti menguraikan, dan secara terminologis yang berbeda yang berarti menyatukan. Namun *analisis* dan *sintesis* dipandang sebagai metode-metode utama dalam *interpretasi*. *Interpretasi* merupakan proses penafsiran terhadap fakta-fakta yang menyangkut dengan seleksi sejarah sedangkan *sintesis* berarti menyatukan". Yaitu menetapkan makna yang saling berhubungan dari fakta-fakta yang diperoleh. Merangkai fakta-fakta itu menjadi keseluruhan yang masuk akal. Dalam hal ini penulis menganalisis data dan fakta yang sudah diperoleh lalu memilah data yang sesuai dengan kajian yang ditulis oleh peneliti.

5. Historiografi (Penulisan Sejarah)

Menurut Kuntowijoyo dalam (Sukmana, 2021:2) "istilah *historiografi* dapat dimaknai sebagai hasil atau karya dalam penulisan sejarah. Berdasarkan pengertian diatas dapat dipahami bahwa peristiwa sejarah memerlukan penelitian sebelum disajikan dalam bentuk *historiografi*". Menurut Abdullah &

Surjomirharjo dalam Padiatra (2020:20) “*historiografi* merupakan sebuah hasil dalam penulisan sejarah. Dalam hal ini penulisan sejarah merupakan puncak dari segala-galanya yang telah dituliskan oleh sejarah”.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Dampak Sosial, peralihan kekuasaan dari Belanda ke Jepang pada 8 Maret 1942 diawali dengan strategi propaganda yang cerdas, seperti semboyan "*Nippon Cahaya Asia, Nippon Pemimpin Asia, Nippon Pelindung Asia.*" Strategi ini, ditambah dengan kesamaan fisik antara Jepang dan pribumi, berhasil mengikis pengaruh Barat dan menarik simpati masyarakat Indonesia, sebagaimana diungkapkan oleh Fadli & Kumalasari dalam Duma & Reka (2023:2). Jepang memposisikan diri sebagai pembebas, bahkan membebaskan pejabat Belanda yang ditahan untuk melatih orang Indonesia, menunjukkan niat mereka untuk melibatkan pribumi dalam administrasi pemerintahan di bawah konsep "Asia untuk Asia." Namun, di balik propaganda dan janji, dampak sosial yang paling mencolok dan merusak adalah program *Romusha*. Ribuan rakyat Indonesia dipaksa bekerja dalam proyek-proyek infrastruktur guna mendukung kepentingan perang Jepang. Praktik ini tidak hanya merenggut tenaga produktif dari desa-desa, tetapi juga menghancurkan stabilitas keluarga dan komunitas, menyebabkan disintegrasi sosial dan penderitaan fisik serta mental yang meluas. Senada dengan hal tersebut, muncul pula fenomena Jugun Ianfu, yaitu wanita Indonesia yang dipaksa menjadi penghibur bagi pasukan Jepang. Praktik ini menimbulkan trauma psikologis dan sosial yang berkepanjangan bagi para korbannya, menunjukkan betapa kejamnya eksploitasi manusia selama periode tersebut.

Dampak Budaya, di bidang budaya, Jepang menerapkan berbagai kebijakan untuk mengikis identitas lokal dan menanamkan nilai-nilai Jepang, demi mendukung loyalitas dan mobilisasi perang. Salah satu praktik yang dipaksakan adalah *Seikeire*, yaitu ritual membungkuk setiap pagi sebagai penghormatan kepada Kaisar Jepang. Ini adalah upaya nyata untuk mengindoktrinasi masyarakat dengan ideologi Shinto dan menuntut loyalitas mutlak. Dalam sektor pendidikan, Jepang memperkenalkan reformasi signifikan dengan mengganti bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar dan memperkenalkan Bahasa Indonesia serta Bahasa Jepang. Meskipun kebijakan ini secara tidak langsung meningkatkan akses pendidikan bagi pribumi dan memicu perkembangan Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan yang semakin kuat, tujuan utamanya adalah indoktrinasi dan mobilisasi massa untuk kepentingan perang mereka. Hal ini sejalan dengan pernyataan bahwa Jepang berusaha memperkuat kontrol mereka dan mendorong masyarakat untuk beradaptasi dengan sistem baru yang seringkali bertentangan dengan tradisi dan budaya lokal. Kebijakan ini juga memperkenalkan sejumlah kosakata dan konsep dari Bahasa Jepang yang masih digunakan hingga kini, menunjukkan warisan linguistik dari periode tersebut. Secara keseluruhan, meskipun singkat, pendudukan Jepang meninggalkan warisan kompleks yang membentuk dinamika sosial dan budaya Indonesia pascakemerdekaan, ditandai oleh penderitaan yang mendalam di satu sisi, namun juga memicu perkembangan tidak langsung yang signifikan di sisi lain.

B. Pembahasan

Pendudukan Jepang di Indonesia antara tahun 1942 hingga 1945 adalah periode singkat namun sangat berpengaruh dalam sejarah bangsa. Meski berlangsung hanya sekitar 3,5 tahun, kekuasaan Jepang meninggalkan jejak mendalam, baik berupa penderitaan maupun fondasi perubahan yang signifikan dalam aspek sosial dan budaya.

1. Dampak Pendudukan Jepang di Bidang Sosial

a) *Romusha* (Sistem kerja paksa)

Salah satu dampak sosial paling kelam dari pendudukan Jepang adalah sistem *Romusha*. Jutaan laki-laki Indonesia dipaksa bekerja tanpa upah yang layak, bahkan seringkali tanpa makanan dan perawatan medis yang memadai. Mereka dikirim ke berbagai proyek pembangunan di seluruh Asia Tenggara, seperti pembangunan jalan, jembatan, dan benteng pertahanan, yang mengakibatkan angka kematian yang sangat tinggi. "Pengerahan tenaga kerja paksa atau romusha menjadi kebijakan Jepang yang paling kejam. Banyak laki-laki Indonesia yang menjadi korban romusha meninggal dunia akibat kelaparan, penyakit, dan penyiksaan". Ricklefs (2008:425-426).

Dalam konteks sosial, penerapan sistem *Romusha* terjadi sebagai tanggapan terhadap eksploitasi ekonomi selama masa pendudukan Jepang. Praktik ini telah mengakibatkan kerusakan pada lingkungan dan memicu krisis ekonomi. Pemerintah Jepang memperkenalkan gerakan sosial melalui *Kinrohosi* atau kerja sukarela yang kemudian berubah menjadi kerja paksa demi kepentingan perang. Dengan berkembangnya wilayah pendudukan Jepang, diperlukan tenaga kerja besar untuk membangun *infrastruktur* pertahanan seperti *bunkers*, landasan udara, jalan, dan gudang bawah tanah. Tenaga kerja ini direkrut dari desa-desa yang padat penduduk di Jawa, dan proses ini dikenal sebagai *Romusha*. Pada awalnya, partisipasi dalam *Romusha* bersifat sukarela, tetapi seiring dengan eskalasi perang Pasifik, tekanan untuk bekerja meningkat, dan pengelolaan tenaga kerja diserahkan kepada organisasi lokal yang dikenal sebagai *Romukyokai*. Banyak *Romusha* yang tidak kembali atau meninggal karena kondisi kerja yang berat dan kurangnya dukungan gizi serta kesehatan yang memadai". Isnaeni dan Apid dalam Dumma (2023:119).

Pada akhirnya, mobilisasi *Romusha* berdampak besar terhadap struktur sosial di Indonesia. Banyak pemuda yang melarikan diri dari desa-desa untuk menghindari menjadi *Romusha*, sementara di desa hanya tersisa perempuan, anak-anak, dan orang tua. Ketika perang berakhir, hanya sebagian dari *Romusha* yang berhasil kembali ke kampung halaman mereka, sementara banyak lainnya meninggal atau hilang. Pengerahan *Romusha* mencerminkan salah satu bentuk *eksploitasi* brutal yang dilakukan oleh Jepang selama masa pendudukannya di Indonesia, yang menyisakan luka mendalam dalam sejarah bangsa". Sinaga (2024:385).

Romusha sebagai gambaran nyata dari *eksploitasi* manusia terbesar yang pernah terjadi di negeri ini. Bayangkan saja, para pemuda, yang sebagian besar adalah petani dan penganggur, individu-individu yang seharusnya menjadi pilar ekonomi dan sosial dipaksa untuk bekerja dalam kondisi yang tak terbayangkan. Mereka dikirim ke berbagai proyek *infrastruktur* militer yang berat, seperti pembangunan jalan, jembatan, landasan udara, hingga bunker pertahanan, bahkan dikirim ke luar Jawa. Membayangkan penderitaan fisik yang mereka alami: kurang gizi, tanpa perawatan medis yang memadai, dan bekerja hingga batas kemampuan tubuh, jauh dari keluarga mereka. Tidak heran jika banyak dari mereka yang meninggal dunia karena kelelahan, penyakit, atau kelaparan bahkan kematian. Kekejaman ini bukan hanya merenggut nyawa, tetapi juga meninggalkan trauma mendalam bagi para penyintas dan keluarga mereka, menjadi salah satu babak tergelap dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia.

Lebih dari sekadar penderitaan fisik, kebijakan *Romusha* juga merusak tatanan sosial masyarakat Indonesia. Keluarga kehilangan kepala rumah tangga, anak-anak kehilangan ayah, dan desa-desa kehilangan tenaga produktif. Dampak psikologis dan sosial dari kehilangan ini pasti sangat besar, menciptakan trauma yang diturunkan dari generasi ke generasi. Ini adalah pengingat betapa rentannya sebuah bangsa di bawah belenggu penjajahan, di mana kehidupan manusia tidak lagi dihargai.

b) *Jugun Ianfu* (Wanita Penghibur)

Dampak sosial yang tak kalah tragis adalah praktik *Jugun Ianfu*, di mana ribuan perempuan Indonesia, banyak di antaranya masih remaja, dipaksa menjadi budak seks bagi tentara Jepang. Mereka

mengalami kekerasan fisik dan mental yang parah, meninggalkan trauma mendalam seumur hidup". "Ribuan perempuan Indonesia menjadi korban jugun ianfu, dipaksa melayani kebutuhan seksual tentara Jepang. Mereka mengalami penderitaan yang luar biasa dan trauma berkepanjangan". Ota (2007:56).

Para korban yang tersebar di wilayah Jawa Barat seperti di daerah Cimahi, Sukabumi, Bogor, dan Sumedang. Berdasarkan testimoni-testimoni para korban Jugun Ianfu, bahwa mereka seringkali menerima kekerasan-kekerasan seksual yang baik itu dilakukan oleh Tentara Jepang maupun para Perwiranya. Kekerasan tersebut dilakukan oleh Jepang sudah dimulai dari proses perekrutan para calon korban hingga sampai dengan mereka mendapatkan serangan-serangan brutal pada saat melayani hasrat nafsu para Tentara Jepang. Tentara Jepang sudah melakukan perkosaan, perdagangan orang untuk tujuan seksual, eksploitasi sosial, penyiksaan seksual dan juga perbudakan seksual terhadap perempuan-perempuan remaja di Indonesia termasuk di Jawa Barat dan memberikan dampak traumatis bagi mereka yang mengalaminya baik itu secara fisik, dampak terhadap masyarakat dan juga psikologis korban Jugun Ianfu tersebut". Astrid dkk (2020:180).

Praktik *Jugun Ianfu* atau yang lebih dikenal sebagai "wanita penghibur" pada masa pendudukan Jepang di Indonesia. Merupakan salah satu luka terdalam dalam sejarah bangsa Indonesia. Ribuan perempuan, banyak di antaranya masih sangat muda, dipaksa untuk melayani kebutuhan seksual tentara Jepang di rumah-rumah bordil militer. Mereka hidup dalam kondisi yang mengerikan, mengalami kekerasan fisik dan mental, serta kehilangan harkat dan martabat kemanusiaannya. Kisah-kisah pilu ini, yang seringkali tersembunyi karena trauma, menjadi pengingat yang sangat kuat akan dampak brutal perang terhadap kemanusiaan, khususnya pada perempuan yang seringkali menjadi korban paling rentan.

Hal yang paling mengerikan adalah fakta bahwa sistem ini tidak terjadi secara sporadis, melainkan terorganisir secara militeristik dan diketahui oleh petinggi-petinggi kekaisaran Jepang. Ini menunjukkan betapa rendahnya nilai kemanusiaan di mata mereka saat itu, di mana kebutuhan biologis tentara dianggap lebih penting daripada hak asasi dan integritas perempuan. Kehidupan para perempuan ini berubah menjadi neraka, dan penderitaan mereka tidak berakhir setelah perang. Para korban merasa malu, bersalah, dan tertekan, bahkan sebagian dari mereka menyembunyikan masa lalu mereka demi melindungi keluarga dan anak cucu. Kondisi ini diperparah dengan minimnya perhatian dari pemerintah, yang cenderung menutupi masalah ini. Hal ini menyebabkan banyak dari mereka hidup dalam kemiskinan dan kesulitan ekonomi, karena sulit mendapatkan pekerjaan. Trauma psikologis ini membuat mereka hidup dalam bayang-bayang penderitaan dan tekanan, yang tidak pernah benar-benar pulih bahkan hingga akhir hayat mereka.

Jugun Ianfu adalah pengingat yang sangat pahit tentang bagaimana perang dapat meruntuhkan moralitas dan menciptakan kebrutalan yang tak terbayangkan. Sebagai bagian dari sejarah Indonesia, kita memiliki tanggung jawab moral untuk terus mengangkat kisah-kisah mereka. Ini bukan hanya tentang menuntut keadilan bagi para korban yang masih tersisa, tetapi juga untuk memastikan bahwa tragedi serupa tidak akan pernah terulang di mana pun dan kapan pun. Memahami Jugun Ianfu adalah memahami salah satu manifestasi terburuk dari penindasan yang harus selalu kita lawan.

c) Pendidikan

Salah satu jalan yang dianggap Jepang cukup mudah untuk mencapai Indonesia yang berada di bawah doktrin Jepang adalah dengan menggunakan pendidikan. Dengan asumsi tersebut, membuat Jepang mengubah sistem pendidikan Indonesia yang membuat kurikulum Indonesia saat itu berubah total. Awalnya Jepang melarang dan mengurangi pembelajaran bahasa Arab di sekolah, mengganti pembelajaran agama Islam menjadi agama *Shinto*, keharusan untuk menyanyikan lagu kebangsaan Jepang di sekolah, melakukan *Seikerei* dengan membungkuk kearah matahari, serta mengubah metode pembelajaran yang ada di sekolah pada saat itu". Danna dan Devgano dalam Rahma dkk (2024:206).

Masa penjajahan Belanda dan Jepang di Indonesia memiliki perbedaan signifikan dalam sistem pendidikan, yang mencerminkan tujuan dan ideologi masing-masing. Di bawah pemerintahan kolonial Belanda, pendidikan ditujukan untuk melanggengkan kekuasaan mereka dengan menciptakan hierarki sosial. Sekolah-sekolah Belanda didirikan dengan sistem kelas yang terpisah berdasarkan ras dan status sosial. Sekolah tingkat atas, seperti Europeesche Lagere School (ELS), hanya diperuntukkan bagi anak-anak Eropa, sementara anak-anak pribumi hanya bisa bersekolah di sekolah yang lebih rendah seperti Hollandsch-Inlandsche School (HIS). Sartono (2011:153). Kurikulumnya lebih fokus pada mata pelajaran dasar dan bahasa Belanda, yang tujuannya adalah melahirkan tenaga kerja administrasi rendah yang bisa membantu birokrasi kolonial, bukan untuk mencerdaskan atau memajukan rakyat pribumi.

Sebaliknya, saat Jepang berkuasa, mereka berusaha menerapkan sistem pendidikan yang lebih seragam untuk semua golongan tanpa memandang ras. Mereka menghapus sistem kelas yang diskriminatif dan mengganti bahasa pengantar dari bahasa Belanda menjadi bahasa Indonesia. Meskipun tampak lebih adil, kurikulum pendidikan masa Jepang justru lebih berorientasi pada kepentingan militer dan propaganda Jepang. Pelajaran yang diberikan menekankan indoktrinasi ideologi Jepang, seperti semangat kerja, disiplin, dan pengabdian kepada kaisar. Tujuan utamanya adalah untuk mempersiapkan rakyat Indonesia agar bisa mendukung upaya perang mereka di Asia Pasifik. Nugroho (2015:45). Dengan demikian, meskipun secara struktural Jepang lebih inklusif, substansi pendidikannya sangat dimanfaatkan untuk kepentingan militeristik mereka, berbeda dengan Belanda yang lebih fokus pada tujuan administratif dan ekonomi.

Kebijakan-kebijakan yang digagas Jepang tersebut mendapat tentangan dari ulama-ulama dengan tidak tunduk dan patuh pada Jepang karena beberapa kebijakan tersebut termasuk ke dalam hal yang bertentangan dengan akidah dan keyakinan umat Islam yang mayoritas tinggal di Indonesia. Berdasarkan tentangan tersebut, Jepang menerima dan memberikan keringanan dengan tidak terlalu mengatur umat Islam serta menyetujui pembelajaran bahasa Arab dan agama Islam di sekolah karena tujuan utama Jepang bukan untuk menshintokan masyarakat Indonesia, melainkan agar mendapat dukungan dari masyarakat Indonesia agar mendapat bantuan di perang yang dipimpin oleh Jepang melawan sekutu pada perang Asia Pasifik. Kebijakan pendidikan yang digagas Jepang di Indonesia dikhususkan oleh Jepang agar mampu membuat masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam mempercayai Jepang sebagaimana yang tertera dalam doktrin 3A. Pola politik yang digagas Jepang di Indonesia disebut dengan politik *Nipponisasi*, sebagaimana yang telah dilakukan Jepang semasa menduduki Korea dan Taiwan". Ammin dkk dalam Rahma dkk (2024:207)

Meskipun dalam konteks penjajahan, pendudukan Jepang juga membawa perubahan dalam bidang Pendidikan. Salah satu kebijakan penting adalah penghapusan sistem pendidikan berjenjang berdasarkan ras yang diterapkan Belanda, dan digantikan dengan sistem pendidikan yang lebih seragam. Selain itu, bahasa Indonesia mulai digunakan secara lebih luas sebagai bahasa pengantar. Namun, kurikulum juga disisipi dengan *indoktrinasi* Jepang. "Jepang menghapus sistem pendidikan berjenjang warisan Belanda dan memperkenalkan pendidikan yang lebih merata, walaupun tetap diwarnai dengan propaganda Jepang". Sartono (1990:88).

Pendidikan di Indonesia telah melalui perjalanan panjang yang sarat perubahan, dari sistem kolonial yang *diskriminatif* hingga upaya pemerataan akses pasca-kemerdekaan. Awalnya, pendidikan lebih condong untuk melayani kepentingan penguasa dan hanya segelintir elit yang bisa merasakan bangku sekolah. Namun, semangat *reformasi* terus mendorong terbukanya pintu pendidikan bagi semua lapisan masyarakat, dengan harapan mampu menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing. Tantangan seperti kesenjangan kualitas antar daerah, *relevansi* kurikulum dengan kebutuhan zaman, dan pemerataan fasilitas masih menjadi pekerjaan rumah besar. Meski demikian, semangat untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas pendidikan demi masa depan bangsa yang lebih baik tidak pernah padam. Pada akhirnya, pendidikan di masa Jepang adalah sebuah cerminan kompleks dari kondisi saat itu. Dijadikan sebagai alat *indoktrinasi* dan *eksploitasi*, tetapi juga menjadi

pemicu bagi beberapa perubahan positif, terutama dalam hal kemudahan dan penguatan Bahasa Indonesia. Dalam periode ini mengajarkan kita tentang pentingnya menjaga kemerdekaan berpikir dan inti sejati dari pendidikan yang membebaskan, bukan yang mengekang.

2. Dampak Pendudukan Jepang di Bidang Budaya

a) Penghormatan kepada Dewa Matahari (*Seikerei*)

Salah satu aspek budaya yang dipaksakan Jepang adalah *Seikerei*, yaitu praktik membungkuk ke arah matahari terbit (Tokyo) sebagai bentuk penghormatan kepada Kaisar Jepang yang dianggap keturunan Dewa Matahari. Praktik ini sering bertentangan dengan keyakinan agama lokal dan menimbulkan penolakan dari sebagian masyarakat. "Jepang mewajibkan praktik *Seikerei*, yaitu membungkuk ke arah Tokyo, sebagai bentuk penghormatan kepada Kaisar Jepang. Hal ini sering menimbulkan konflik dengan keyakinan agama umat Islam." Benda H. J. (1958:68).

Perubahan dari aturan *Seikeire* di Indonesia, yang merupakan bentuk penghormatan wajib kepada Kaisar Jepang, tidak terjadi secara tiba-tiba. Awalnya, pihak Jepang mewajibkan setiap penduduk di wilayah pendudukan, termasuk Indonesia, untuk melakukan ritual ini, yaitu membungkuk ke arah timur. Aturan ini sangat menyinggung banyak umat Islam di Indonesia, karena membungkuk hanya dilakukan sebagai bentuk penghormatan kepada Tuhan, Allah SWT, dalam ajaran Islam. Konflik antara aturan Jepang dan keyakinan agama ini menyebabkan perlawanan dari tokoh-tokoh agama dan masyarakat, yang menolak untuk melakukannya. Lestari (2021:17). Hal ini menimbulkan ketegangan besar antara Jepang dan penduduk lokal, terutama di kalangan ulama dan pemimpin agama, yang melihat *Seikeire* sebagai bentuk syirik atau penyekutuan Tuhan.

Menyadari bahwa penolakan terhadap *Seikeire* dapat membahayakan stabilitas kekuasaan mereka dan menghambat dukungan rakyat Indonesia, Jepang kemudian mulai mengubah pendekatannya. Awalnya, mereka bersikeras dan bahkan melakukan kekerasan terhadap pihak yang menolak, tetapi perlawanan yang terus-menerus membuat mereka sadar bahwa kebijakan ini tidak efektif. Jepang akhirnya melonggarkan aturan tersebut dan memberikan penjelasan baru, bahwa ritual itu bukan bentuk penyembahan, melainkan hanya sebagai penghormatan kepada Kaisar yang dianggap sebagai lambang persatuan dan kemakmuran Asia. Ibrahim (2013:45). Meskipun demikian, banyak umat Islam yang tetap menolak dan tidak mau melakukannya, tetapi perubahan sikap Jepang ini menunjukkan bahwa mereka mulai mengakomodasi tuntutan rakyat demi menjaga ketenangan sosial dan mendapatkan simpati dari rakyat Indonesia, yang mereka butuhkan untuk upaya perang mereka.

Di antara peraturan-peraturan yang dibuat oleh Jepang, yang paling ditentang oleh masyarakat khususnya pada umat Islam adalah kewajiban melakukan *seikerei* atau pemberian hormat setiap pagi bersikap membungkuk atau menundukan kepala ke arah Tokyo untuk memberi hormat kepada Kaisar Jepang. Alasan para ulama untuk menentang peraturan tersebut karena dianggap syirik, seperti perbuatan menyembah berhala dan menyamakan kaisar Jepang dengan Tuhan". Oktorino dalam Astrid dkk (2020:176-177).

Mereka yang menolak seringkali mendapatkan perlakuan kejam, mulai dari hukuman fisik seperti ditampar, ditendang, atau dijemu di bawah terik matahari, hingga hukuman yang lebih berat, bahkan ada kasus di mana beberapa orang ditembak mati. Sofianto (2014:51-61). Penolakan ini terutama datang dari kalangan umat Islam, termasuk para ulama, yang menganggap *Seikeire* bertentangan dengan ajaran agama karena hanya Tuhan yang layak disembah. Penolakan terhadap *Seikeire* juga memicu berbagai perlawanan dan pemberontakan di beberapa daerah, yang menunjukkan bahwa rakyat Indonesia tidak gentar menghadapi kekejaman Jepang demi mempertahankan keyakinan mereka. Salah satu contoh yang terkenal adalah perlawanan yang dipimpin oleh KH Zainal Mustafa di Singaparna, Jawa Barat. Perlawanan ini berawal dari penolakan terhadap kewajiban *Seikeire*, yang kemudian memicu pemberontakan bersenjata yang hebat. Meskipun perlawanan ini akhirnya

dipadamkan oleh militer Jepang, peristiwa ini menjadi bukti nyata bahwa penolakan terhadap *Seikeire* adalah salah satu pemicu utama perlawanan rakyat terhadap pendudukan Jepang.

Penghormatan ini biasanya diikuti dengan menyanyikan lagu kebangsaan Jepang (*Kimigayo*). Jadi, tidak semua rakyat Indonesia menerima kebiasaan akan hal ini terutama dari kalangan umat Islam. Sehingga penerapan *Seikerei* ini ditentang oleh kalangan umat Islam, salah satunya perlawanan oleh KH. Hasyim Asy'ari dan KH. Zainal Mustafa pengasuh Pesantren Sukamanah, Jawa Barat". Muhammad.R & Dyah (2019:202).

Praktik *Seikeire* atau penghormatan kepada Kaisar Jepang dan Dewa Matahari dengan membungkuk ke arah timur adalah salah satu bentuk *indoktrinasi* yang dipaksakan Jepang selama pendudukannya di Indonesia. Rakyat dan para pelajar termasuk di Lubuklinggau, dipaksa untuk melaksanakan ritual ini setiap pagi. Hal ini bukan sekadar ritual keagamaan, melainkan upaya Jepang untuk menanamkan kesetiaan mutlak dan kelebihan budayanya kepada bangsa jajahannya. Bagi masyarakat Indonesia *Seikeire* adalah simbol penindasan dan hilangnya kebebasan berkeyakinan, meninggalkan memori pahit akan penjajahan yang berupaya mengikis identitas dan spiritualitas mereka.

b) Perkembangan Bahasa Indonesia Pada Masa Pendudukan Jepang di Indonesia

Pengaruh Belanda di Indonesia dianggap Jepang sebagai penghambat penanaman doktrin *hakko I chiu* dan 3 A, sehingga Jepang berusaha untuk menghilangkan pengaruh tersebut dengan beberapa cara di antaranya adalah dengan pelarangan penggunaan bahasa Belanda dan Barat di Indonesia. Bahasa Belanda dan Barat yang dilarang oleh Jepang kemudian diganti menjadi bahasa Jepang dan bahasa Indonesia, serta Jepang juga tidak melarang rakyat Indonesia untuk menggunakan bahasa daerah. Keseriusan Jepang terhadap penggunaan bahasa Indonesia dan Jepang dibuktikan dengan digantinya nama-nama jalan, nama daerah seperti Batavia kembali menjadi Jakarta serta seluruh patungpatung bekas penjajah Belanda dirobuhkan pada saat itu. Cara yang dilakukan oleh Jepang ini terbukti mampu menarik perhatian rakyat Indonesia yang cukup membenci Belanda, sehingga Jepang dengan mudah menyebarkan doktrin bahwa mereka adalah saudara tua Indonesia". Rahma dkk (2024:211)

Salah satu dampak budaya yang paling signifikan dan positif adalah Perkembangan Bahasa Indonesia. Jepang melarang penggunaan bahasa Belanda dan mendorong penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi dan bahasa pengantar. Hal ini secara tidak langsung mempercepat penyebaran dan standardisasi bahasa Indonesia, yang kemudian menjadi bahasa persatuan pasca-kemerdekaan. "Pelarangan penggunaan bahasa Belanda dan pengangkatan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi oleh Jepang telah memberikan momentum besar bagi perkembangan bahasa Indonesia." Alisjahbana, S. T. (1961:55).

Penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa perhubungan tidak menutup penggunaan bahasa daerah pada saat itu, bahkan diperbolehkan untuk menggunakan bahasa daerah dalam penulisan surat seperti bahasa Sunda dan Madura Jepang bahkan menyetujui penggunaan bahasa daerah dalam pembicaraan lewat telepon". Kan po dalam Rahma dkk (2024:212).

Keseriusan Jepang dalam memanfaatkan bahasa Indonesia sebagai alat propogandanya adalah Jepang membentuk sebuah kelompok yang ditugaskan dalam mengurus pengembangan bahasa Indonesia. Kelompok yang dimaksud adalah Balai Poestaka dan memiliki majalah sendiri yang dikenal Pandji Poestaka yang didirikan pada 1 Agustus 1942. Kelompok dipimpin oleh Alisjahbana, Rasjad dan Soebadio ini rutin melakukan pertemuan pada hari sabtu". Permadi and Purwaningsih, dalam Rahma dkk (2024:213). Hasil usaha yang dilakukan oleh kelompok ini adalah diterbitkannya sebuah pedoman penerjemah yang aktif digunakan saat itu. Pedoman tersebut antara lain:

- a. Bahasa Seoemoemnja di Balai Poestaka
 - 1) "Bahasa salinan hendaklah sama soeasananya dengan bahasa asing jang disalin itoe. Tetapi hal ini tidak berarti bahwa soeasana ataoe atoeran jang khoesoes bagi bahasa Indonesia dilenyapkan.
 - 2) Bahasa Indonesia jang dipakai ialah bahasa Indonesia zaman sekarang.
- b. Kata-Kata

- 1) Sedapatnya dicari kata Indonesia jang soedah ada oentoek mengganti kata asing ataoe kalaoe tidak ada kata daerah jang moedah didjadikan kata Indonesia .
- 2) Kalaoe kedoeanya tidak ada, oleh karena pengertian ataoe benda jang diperkatakan itoe tidak ada ataoe tidak diketahoei dalam lingkoengan bahasa Indonesia, maka hendaklah diboeat kata baroe ataoe soesoenan baroe jang sesingkat-singkatnja.
- 3) Memboeat kata baroe itoe sedapat-dapatnja dengan djalan memperhatikan pengertian ataoe benda itoe sendiri.
- 4) Kalaoe tidak dapat kata dengan djalan, baroelah boleh menjalin arti kata asing itoe.
- 5) Kalaoe djalan 4 tidak djoega berhasil, baroelah boleh memakai kata asing.
- 6) Dalam memilih kata-kata menoeroet, bahasa Arab, bahasa Sanskerta dan bahasa Nippon didahoeloean.
- 7) Kata Barat dipakai sedapat-dapatnja dengan memilih kata jang bersifat Internasional
- 8) Ejaan
- 9) Oentoek sementara, sebelom ada ketentoean baroe sedapat-dapatnja dipakai ejaan *Van Ophuysen* Perubahan Budaya Masyarakat Indonesia (Studi Pada Pendidikan Masa Pendudukan Jepang)
- 10) Sedapat-dapatnja kata asing hendaklah ditoelis dengan edjaan dan boenji bahasa Indonesia”. Poestaka dalam Rahma dkk (2024:213).

Jepang menunjukkan keseriusannya dalam penggunaan bahasa Indonesia pada masa pendudukan dengan melakukan kodifikasi. Upaya itu dilakukan dengan membentuk suatu kepanitiaan pada 20 Oktober 1942 dengan nama *Indonesiago Seibu Inka* atau Komisi Bahasa Indonesia. Kepanitiaan ini dibentuk dengan tujuan pengembangan dari Balai Pustaka dan diberikan tugas untuk melakukan pengembangan serta pembinaan bahasa Indonesia. Tanggung jawab komisi ini berada dalam naungan ahli bahasa Indonesia yang terkenal akan keilmuannya” Rahma dkk (2024:214).

Meski singkat, masa pendudukan Jepang di Indonesia justru menjadi periode penting bagi perkembangan Bahasa Indonesia. Jepang yang melarang penggunaan Bahasa Belanda dan membatasi Bahasa Inggris, secara tidak langsung memaksa rakyat dan administrasi untuk menggunakan Bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar utama. Kebijakan ini didorong oleh kebutuhan Jepang untuk berkomunikasi dengan penduduk lokal dan menyebarkan propagandanya. Secara *revolutioner* mengangkat derajat Bahasa Indonesia dari bahasa pergaulan menjadi bahasa resmi yang digunakan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan, pemerintahan, dan media massa. Meski dilatarbelakangi oleh kepentingan penjajah, kebijakan ini secara signifikan mempercepat proses penyebaran Bahasa Indonesia, meletakkan fondasi kuat bagi kedudukannya sebagai bahasa persatuan setelah kemerdekaan.

c) Perkembangan Bahasa Jepang Pada Masa Pendudukan Jepang di Indonesia

Selain memperluas penggunaan bahasa Indonesia, Jepang juga berusaha untuk menyebarkan bahasanya sendiri. Jepang melakukan berbagai cara untuk menyebarkan bahasa Jepang. Cara tersebut seperti berpidato tentang pentingnya bahasa Jepang, mempublikasikan pelajaran bahasa Jepang dalam surat kabar dan majalah, mengadakan kursus dan sekolah bahasa Jepang secara gratis dan menawarkan pekerjaan bagi masyarakat yang menguasai bahasa Jepang. Jepang juga mengadakan berbagai sayembara dalam bahasa Jepang seperti sayembara nama rokok, lagu perjuangan, dan lain - lain”. Edo (2015:598).

Jepang membuka sekolah bahasa Jepang untuk masyarakat umum secara gratis agar bahasa Jepang dapat meluas di kalangan masyarakat Indonesia. Sekolah bahasa Jepang ini diselenggarakan dibawah pengajaran guru – guru dari Jepang secara langsung. Jepang juga menawarkan pekerjaan pada masyarakat yang menguasai bahasa Jepang atau telah menempuh pendidikan bahasa Jepang. Dengan cara ini masyarakat akan semakin berminat mempelajari bahasa Jepang dengan harapan akan mendapat pekerjaan dengan mudah”. Kanpo dalam Edo (2015:598).

Jepang juga memberikan kursus bahasa Jepang pada kaum peranakan sehingga bahasa Jepang juga tersebar di kalangan kaum peranakan. Kursus bahasa Jepang ini diselenggarakan di *Kooa Bunka Kaikan* (Balai Budaya Asia Bangun) dan dipimpin oleh Nomachi dan Gijsburg. Kursus bahasa Jepang ini diadakan sebanyak dua kali seminggu. Selain mengadakan sekolah dan kursus bahasa Jepang, pemerintah balatentara Jepang juga mengadakan pelajaran bahasa Jepang di sekolah – sekolah yang sudah ada seperti di sekolah Taman Siswa. Gakko dalam Edo (2015:598).

Penggantian nama – nama Belanda atau Barat tidak ke dalam bahasa Indonesia saja, namun juga ke dalam bahasa Jepang. Contoh penggantian nama – nama ke dalam bahasa Jepang yakni :

- 1) Rokok “*Maskot*” menjadi rokok “*Kooa*” yang berarti “Asia Bangun”
- 2) Rokok “*Davros*” menjadi rokok “*Mizoeho*” yang berarti “Padi”
- 3) Rokok “*Double Ace*” menjadi rokok “*Sekidoo*” yang berarti “Khatulistiwa”
- 4) “*Oranje Boulevard*” menjadi “Jalan Raya *Syoowa*”, “*Van Heutz Boulevard*” menjadi “Jalan *Imamura*”, “*Nassau Boulevard*” menjadi “Jalan Raya *Meiji*”. Tjahaja dalam Edo (2015:599).

Pemerintah militer Jepang terus berupaya memperkenalkan dan menyebarkan Bahasa Jepang. Yang tujuannya sebagai alat kontrol, *indoktrinasi*, dan bagian dari upaya “*Nipponisasi*” atau Jepangisasi penduduk jajahan. Bahasa Jepang diajarkan di sekolah-sekolah, digunakan dalam administrasi, dan dipropagandakan melalui media massa. Dengan menguasai bahasa Jepang, rakyat diharapkan dapat lebih mudah menerima perintah dari penguasa militer, sehingga memudahkan Jepang dalam mengelola pemerintahan dan menggerakkan rakyat untuk mendukung upaya perang mereka. Selain itu, penggunaan bahasa Jepang juga berfungsi untuk menghapus pengaruh bahasa Belanda yang telah mendominasi selama berabad-abad, sehingga secara simbolis memperkuat kekuasaan Jepang. Akan tetapi upaya pemaksaan yang sangat gencar ini, tidak seefektif yang diharapkan Jepang. Penekanan yang kuat pada Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan justru menjadi bumerang. Masyarakat lebih cenderung menggunakan Bahasa Indonesia karena lebih mudah dipelajari dan sudah memiliki akar kuat dalam komunikasi sehari-hari. Bahasa Jepang seringkali hanya dipelajari sebatas untuk keperluan praktis agar tidak dihukum atau untuk mendapatkan posisi tertentu. Begitu pendudukan Jepang berakhir, penggunaan Bahasa Jepang pun langsung merosot tajam, menyisakan hanya beberapa serapan kata yang masih digunakan hingga kini. Pada akhirnya, strategi Jepang untuk menjadikan Bahasa Jepang sebagai bahasa dominan di Indonesia gagal. Hal ini justru secara ironis semakin memperkuat posisi Bahasa Indonesia sebagai identitas bangsa. Bahasa Jepang pada masa itu lebih berfungsi sebagai alat kontrol dan indoktrinasi politik, bukan sebagai jembatan budaya yang tulus.

SIMPULAN

Penjajahan Jepang di Indonesia antara tahun 1942 dan 1945 meninggalkan dampak yang signifikan dan kompleks dalam berbagai aspek kehidupan sosial dan budaya masyarakat. Meskipun singkat, periode ini mengubah tatanan yang telah terbangun selama berabad-abad, terutama di bawah kekuasaan kolonial Belanda.

Secara sosial, pendudukan Jepang menciptakan penderitaan dan perubahan *struktural* yang mendalam. Kebijakan *Romusha* (kerja paksa) mengakibatkan jutaan rakyat Indonesia dipaksa bekerja dalam kondisi yang tidak manusiawi, menyebabkan kelaparan, penyakit, dan kematian massal. Tragedi *Jugun Ianfu*, yaitu praktik perbudakan seksual terhadap perempuan Indonesia, merupakan noda kelam dalam sejarah yang meninggalkan trauma mendalam bagi para korbannya. Di sisi lain, dalam bidang Pendidikan, meskipun Jepang menggunakan sistem pendidikan untuk propaganda, mereka juga membuka kesempatan bagi masyarakat pribumi untuk mengenyam pendidikan lebih luas dibandingkan masa Belanda, terutama dengan memperkenalkan bahasa Jepang dan mengurangi dominasi bahasa Belanda. Hal ini secara tidak langsung meningkatkan kesadaran politik dan nasionalisme.

Penjajahan Jepang juga memengaruhi Peran Perempuan. Meskipun banyak yang dipaksa menjadi *Jugun Ianfu*, perempuan juga diberikan peran lebih aktif dalam organisasi-organisasi yang dibentuk Jepang, yang secara tidak langsung membuka jalan bagi partisipasi mereka dalam kehidupan publik pasca-kemerdekaan. Dalam aspek budaya, Jepang berupaya mengindoktrinasi nilai-nilai mereka dan menghapus pengaruh Barat. Praktik *Seikerei*, yaitu penghormatan kepada Kaisar Jepang dengan membungkuk ke arah Tokyo, dipaksakan kepada seluruh rakyat Indonesia, termasuk umat beragama, yang menimbulkan *resistensi* di beberapa daerah. Namun, salah satu dampak budaya yang paling signifikan dan positif adalah Perkembangan Bahasa Indonesia. Jepang melarang penggunaan bahasa Belanda dan memberikan ruang lebih besar bagi bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dan administrasi. Kebijakan ini secara tidak langsung mendorong standarisasi dan penyebaran bahasa Indonesia ke seluruh wilayah, menjadikannya alat pemersatu bangsa yang krusial dalam perjuangan kemerdekaan dan pembentukan identitas nasional.

Singkatnya, penjajahan Jepang adalah periode yang membawa penderitaan luar biasa melalui eksploitasi dan kekerasan, namun di saat yang sama juga secara tidak langsung meletakkan fondasi bagi bangkitnya nasionalisme dan penguatan identitas bangsa Indonesia, terutama melalui Pendidikan dan perkembangan Bahasa Indonesia. Warisan dari periode ini masih terasa hingga kini, membentuk memori kolektif dan dinamika sosial budaya masyarakat Indonesia.

REFERENSI

- Abdurahman. (2011), *Merode Penelitian Sejarah Islam*. Yogyakarta: Ombak
- Alisjahbana, S. T. 1961. *Indonesia in the Modern World*. South East Asia Institute
- Astrid D. R, Suswandari, Hari N., (2020) *Jugun Ianfu: Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Pada Masa Pendudukan Jepang di Jawa Barat Tahun 1942-1945*. Universitas Muhammadiyah. Prof. DR. HAMKA.
- Benda, H. J. 1958. *The Crescent and the Rising Sun: Indonesian Islam under the Japanese Occupation, 1942-1945*. W. van Hoeve
- Dewi, K.A.I (2010) *Partisipasi Politik Para Tokoh Pakualaman Pada Masa Pergerakan Nasional*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Duma, L. G, Reka, S. (2023) *Ketatanegaraan Indonesia dibawah Masa Pendudukan Jepang (1942-1945)*. Jambi.Jurnal Pendidikan Sejarah & Sejarah FKIP Universitas Jambi.
- Edo G. Permadi. (2015). *Politik Bahasa Pada Masa Pendudukan Jepang*. Surabaya. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Surabaya.
- Hiroshi Shimizu (1994) *Tenaga kerja paksa di Asia Tenggara*. *Journal of Southeast Asian Studies*, Vol. 25, No. 2
- Ibrahim. (2013). "Perjuangan Rakyat Menentang Kekejaman Jepang." Dalam *Tafsir Al-Qur'an Surat Ibrahim*. Hlm. 45.
- Kodansha. (1993). *Japan: An Illustrated Encyclopedia*. Kodansha Ltd.
- Lestari, A. (2021). "Perlawanan Ulama Terhadap Seikeirei di Masa Pendudukan Jepang." Hlm. 17
- Muhammad, R. F, & Dyah, K. (2019). *Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pada Masa Pendudukan Jepang*.
- Najma & Bakri, S. (2020). *Membangun Metodologi Penelitian Sejarah Untuk Pengembangan Islamic Studies Jurnal Academica*. 4(1),45

- Nugroho, S. (2015). "Pendidikan di Masa Pendudukan Jepang." Dalam *Sejarah Pendidikan Indonesia*. Hlm. 45.
- Nurul Z. (2005). *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan, Eori-Aplikasi*. Malang: Bumi Aksara.
- Oktorino Nino, (2013) *Konflik Bersejarah Ensiklopedi Pendudukan Jepang di Indonesia*. Konflik Bersejarah Ensiklopedi Pendudukan Jepang di Indonesia.
- Ota, S. (2007). *Women in Asian History*. University of Hawaii Press
- Rahma, Suswandari, Naredi, (2020). *Jugun Ianfu: Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Pada Masa Pendudukan Jepang di Jawa Barat Tahun 1942-1945*. *Jurnal Chronologia*.
- Ricklefs, M. C. (2008). *A history of modern Indonesia since c. 1200*. Stanford University Press.
- Sartono Kartodirdjo. 1990. *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: Dari Kolonialisme Sampai Kemerdekaan*. Gramedia Pustaka Utama
- Sinaga R. Gabriel, J. F. S. Thoriq, A. Nadya, K. M. (2024). *Kebijakan Pendudukan Jepang di Indonesia 1942-1945*. *AR RUMMAN - Journal of Education and Learning Evaluation*. Vol. 1.
- Sofianto, K. (2014). "Garut Pada Masa Pemerintahan Pendudukan Jepang 1942-1945." *Sosiohumaniora*, 16(1), Hlm. 51–61
- Sukmana, J. W. (2021). *Metode Penelitian Sejarah*. Jurnal Seri Publikasi Pembelajaran. Universitas Lambung Mangkurat, 1(2), 2.
- Suryono (2010) *Jurnal Masyarakat & Budaya, Vol. 12, No. 1*. Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (PMB-LIPI),